

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Pengembangan masyarakat

2.1.1.1. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Menurut (FCDL, 2003 hlm, 1) dalam (Zubaedi, 2013) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan untuk terus-menerus bekerja pada sifat masyarakat dalam pandangan standar hak-hak sipil dan kesamaan. Para pegiat sosial daerah berupaya membantu daerah setempat mewujudkan hak-hak sipil dan saling menghargai melalui program-program yang dibentuk secara komprehensif yang dapat memadukan seluruh komponen masyarakat. Kemajuan wilayah lokal mengkomunikasikan kualitas sosial seperti penerimaan, kesetaraan, kewajiban, peluang, keputusan, dukungan, manfaat bersama, korespondensi bersama, dan pembelajaran yang gigih. Inti dari proses kemajuan daerah adalah pengajaran, memberdayakan daerah untuk dapat melakukan sesuatu dengan memberikan kenyamanan atau fasilitas yang dapat digunakan dalam melibatkan daerah.

(Riyadi, 2019) Menjelaskan Ada dua pola penguatan daerah. Pertama, tindakan memberikan kekuatan dan kekuatan kepada masyarakat agar dapat mandiri. Kedua, penyadaran, atau proses memahami dan menerima keadaan terkini, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun politik. Seseorang dapat dikatakan dapat berada dalam tahap penyadaran jika seseorang dapat membedah masalah yang mereka hadapi, melacak penyebabnya, menentukan kebutuhan, dan mendapatkan informasi baru secara mandiri.

Menurut Wuradji dalam (Lukman, 2020), Pengembangan masyarakat merupakan tahapan membangun kesadaran kritis dengan dilakukan secara transformatif, inklusif, sistematis, dan berkelanjutan dengan mengorganisasikan dan meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah mendasar yang dihadapi, yang mengacu pada perubahan kondisi kehidupan menjadi lebih baik, sesuai dengan dengan keinginan masyarakat. Jadi, istilah *community development* dalam hal ini adalah tahapan mengidentifikasi dan menilai potensi yang ada pada masyarakat setempat yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh setiap elemen masyarakat, yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan dan menentukan solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat setempat.

Istilah pengembangan masyarakat dapat berarti banyak hal bagi beberapa orang. (Sanders 1958) dalam (Nasdian 2015 hlm, 33) menunjukkan pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai siklus, strategi, program atau pembangunan. Dengan demikian, ini menunjukkan empat sudut pandang tentang perbaikan daerah.

a) Pengembangan Masyarakat Sebagai Suatu Proses

(Sanders 1958) dalam (Nasdian 2014 hlm, 33) Pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses yang bergerak dengan mantap, dari keadaan atau keadaan tertentu ke tahap berikutnya, mengingat kemajuan dan perubahan untuk koneksi ke standar yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah yang tidak memihak dan logis membutuhkan definisi dan estimasi yang tepat. Ini menggambarkan hubungan sosial, seperti transisi dari kerja sama minimal ke maksimal, dari situasi di mana semua sumber daya dan pakar berasal dari luar komunitas ke situasi di mana anggota komunitas menggunakan hampir semua sumber daya mereka sendiri, dan dari situasi di mana anggota komunitas menggunakan hampir semua sumber daya mereka sendiri, dan dari situasi di mana satu atau dua individu, atau elit kecil di dalam atau di luar masyarakat, membuat keputusan untuk semua orang. Akibatnya, materi pelajaran adalah pengalaman setiap orang, baik secara psikologis maupun sosiologis.

Sedangkan menurut (A. Supardi 1987 hlm, 24) bahwa pengembangan sebagai sebuah proses, anggota masyarakat pertama-tama membicarakan dan mencari tahu apa yang mereka inginkan, kemudian merencanakan dan bekerja sama untuk mewujudkan keinginan tersebut.

b) Pengembangan Masyarakat Sebagai Suatu Metode

(Sanders 1958) dalam (Nasdian 2014 hlm, 34) Pengembangan masyarakat adalah strategi untuk mencapai beberapa tujuan secara bersamaan. Metode pengembangan masyarakat yang menerapkan langkah-langkah yang diusulkan dalam proses dengan mengakomodasi keinginan pengguna metode (pemerintah, swasta, instansi, atau masyarakat lokal) dapat dilengkapi dengan metode lain seperti perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, perubahan yang sebagian umpan balik dilakukan, dan perubahan dilakukan melalui pendidikan. dapat diterapkan. Proses diarahkan pada tujuan khusus yang memiliki potensi untuk menguntungkan atau merugikan anggota masyarakat.

Tujuan khusus yang berpotensi menguntungkan atau merugikan anggota masyarakat, serta kriteria dan tujuan yang digunakan, menentukan hal ini.

Menurut (Zubaedi 2013 hlm, 6) pengembangan masyarakat sebagai metode adalah Individu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan lebih banyak pengaruh atas proses yang mempengaruhi mereka melalui pengembangan masyarakat.

c) Pengembangan Masyarakat Sebagai Suatu Program

(Sanders 1958) dalam (Nasdian 2014 hlm, 34) Strategi pengembangan masyarakat digambarkan sebagai kumpulan prosedur, dan aktivitas yang menyusun isinya dicantumkan. Program dianggap selesai setelah strategi selesai. Fokusnya cenderung pada program itu sendiri daripada apa yang terjadi pada orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya ketika program sangat diformalkan, seperti dalam rencana lima tahun. Pengembangan masyarakat dikaitkan dengan bidang-bidang tertentu seperti kesehatan, pertanian, industri, dan reaksi sebagai bagian dari program ini.

d) Pengembangan Masyarakat Sebagai Suatu Gerakan

(Sanders 1958) dalam (Nasdian 2014 hlm, 35) Dedikasi masyarakat terhadap pembangunan masyarakat berakar dari kenyataan bahwa pembangunan masyarakat adalah gerakan. Dalam hal ini, perbaikan daerah tentu bukan interaksi yang adil, tetapi melibatkan perasaan. Dengan kata lain, seseorang hanya bisa setuju atau tidak setuju dengan cara masyarakat berkembang. Karena kemajuan harus dilihat dari berbagai nilai dan tujuan dalam sistem sosial-politik, pengembangan masyarakat didedikasikan untuk kemajuan konsep filosofis daripada konsep ilmiah. Selain itu, gerakan community development memiliki kecenderungan untuk melembagakan dirinya sendiri dan membangun struktur organisasinya sendiri yang terbuka untuk praktik dan prosedur profesional. Menurut (A. Supardi 1987 hlm, 24) pemberdayaan masyarakat juga merupakan pembangunan yang mewujudkan kehidupan yang unggul bagi seluruh kawasan lokal melalui kerjasama yang dinamis dan dorongan dari kawasan itu sendiri..

2.1.1.2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

(Sanders 1958) dalam (Nasdian 2014 hlm, 35) Prinsip pengembangan masyarakat menggabungkan perspektif keadilan lingkungan dan sosial. Sangat sulit menerapkan suatu prinsip tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip lain karena prinsip-prinsip tersebut saling berhubungan dalam penerapannya.

Menurut (Nasdian 2014 hlm, 47) mengutip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB 1957) dalam laporan tentang konsep dan prinsip pembangunan masyarakat, menjelaskan 10 prinsip yang dianggap berlaku di seluruh dunia. 10 prinsip tersebut yaitu :

1. Program (proyek) pertama harus dikembangkan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang dirasakan, dan kegiatan yang dilakukan harus berhubungan dengan kebutuhan mendasar masyarakat.
2. Kemajuan lingkungan dapat dicapai melalui upaya-upaya yang terbagi-bagi di wilayah-wilayah utama, namun peningkatan masyarakat yang utuh dan disesuaikan memerlukan upaya bersama dan pembentukan proyek-proyek dengan sasaran yang berbeda.
3. Pada tahap awal pembangunan, perubahan sikap masyarakat sama pentingnya dengan kemajuan materi bagi program pembangunan masyarakat.
4. Sebagai hasil dari pengembangan masyarakat, akan ada tingkat keterlibatan masyarakat yang lebih besar dan lebih baik dalam urusan masyarakat, serta kebangkitan kembali struktur pemerintah daerah yang sudah berfungsi di mana pun kekurangannya.
5. Tujuan mendasar dari setiap program seharusnya adalah identifikasi, dorongan, dan pelatihan para pemimpin lokal.
6. Program pengembangan masyarakat akan diperkuat, disajikan secara komprehensif, dan memastikan perluasan jangka panjangnya jika lebih banyak perempuan dan kaum muda berpartisipasi.
7. Proyek swadaya membutuhkan banyak uang dari pemerintah agar berhasil.
8. Kebijakan yang koheren, pengaturan administrasi khusus, perekrutan dan evaluasi praktisi, mobilisasi sumber daya lokal dan nasional, dan organisasi penelitian, percobaan, dan evaluasi, semuanya diperlukan untuk pelaksanaan program pengembangan masyarakat dalam skala nasional.
9. Pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, program pengembangan masyarakat harus memanfaatkan sepenuhnya sumber daya lembaga swadaya masyarakat.
10. Kemajuan keuangan dan sosial di tingkat terdekat membutuhkan peningkatan yang sama di tingkat publik.

Mereka yang bekerja secara profesional dalam program pengembangan masyarakat akan mendapatkan kepercayaan mendasar jika setiap prinsip ini ditelaah secara individual.

2.1.1.3. Manajemen Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat biasanya terjadi dalam beberapa fase, dimulai dengan penumbuhan, pengembangan, kemandirian. Beberapa praktisi berkolaborasi dalam proyek pengembangan masyarakat, termasuk: pekerja sosial, jaringan lingkungan, kantor kontributor dan kaki tangan terkait. Mereka berkolaborasi selama tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program. (Suharto, 1997 hlm, 292-293 dalam Zubaedi, 2013).

Manajemen berbasis masyarakat, atau CBM, biasanya menjadi fokus utama program pengembangan masyarakat. metode pengelolaan program berdasarkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat setempat. Carter memberikan definisi CBM sebagai : *“A strategy for achieving a people-centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area”* (Latama, Gunarto, et.all, 2000 hlm, 2 dalam Zubaedi 2013).

Sebagian besar kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan secara bertahap oleh pekerja sosial berdasarkan kondisi dan kebutuhan warga binaan. Menurut (Zubaedi, 2013 hlm, 65) Tahapan perencanaan program itu setidaknya meliputi 6 tahap, Antara lain :

Pertama, Tahap Pengajuan Masalah, di mana para aktivis mengkategorikan dan mendefinisikan isu dan tantangan yang dihadapi warga sasaran. Orang lokal biasanya memperhatikan masalah mereka sendiri bahkan jika mereka tidak diungkapkan.

Kedua, Tahap Pemeriksaan Masalah. Tahap ini dilakukan melalui spesialis ramah mengumpulkan data tentang jenis, ukuran dan luasnya masalah yang dilihat oleh penghuni dan membuat data ini dapat diakses dan tersedia untuk individu yang terlibat erat.

Ketiga, Tahap Menetapkan Tujuan dan Sasaran Tujuan mengacu pada visi, tujuan jangka panjang dan penjelasan prinsip-prinsip umum. Terciptanya kehidupan masyarakat dimana semua warga negara terlibat aktif dalam program pelestarian sistem lingkungan dan memastikan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik yang ada dapat menjamin persamaan yang sebesar-besarnya di antara warga negara untuk memenuhi kebutuhan

dasar adalah salah satu contoh pembangunan masyarakat. visi yang dikembangkan oleh seorang pekerja sosial. dan dukungan.

Tujuan, di sisi lain, lebih spesifik. Setelah menentukan tujuan mereka, pekerja sosial membuat prosedur dan tugas yang konkret. Kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat menjadi target yang ditetapkan.

Keempat, Tahap Rencana Aksi. Pekerja sosial merencanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan selama tahap ini. Sambil mengatur latihan, pekerja sosial fokus pada pasokan tenaga kerja, perangkat keras, komunitas informal, cadangan, tempat, data, waktu yang dapat diakses, variabel penghambat, elemen pendukung, mitra, tugas asli yang dilakukan, pihak yang memengaruhi hasil dan mitra kunci baik secara terpisah maupun dalam pertemuan, kesulitan atau bentrokan atau tekanan di antara aparatur dan tujuan dan hasil potensial.

Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Pekerja sosial melakukan tahap ini dengan melakukan langkah-langkah terencana untuk pengembangan masyarakat. Ketika para aktivis berada pada titik ini, mereka perlu memikirkan kemungkinan hasil dari tindakan mereka.

Tahap keenam adalah evaluasi. Pekerja sosial melakukan evaluasi berkelanjutan secara bulanan, mingguan, dan bahkan harian, baik secara formal, semi formal, maupun informal, pada akhir proses pengembangan masyarakat.

Menurut (Soekanto, 1987:63) Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. **Tahap Persiapan.** Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. **Tahapan Pengkajian (*Assessment*).** Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. **Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan.** Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan

bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. **Tahap Pemfomalisasi Rencana Aksi.** Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
5. **Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan.** Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
6. **Tahap Evaluasi.** Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. **Tahap Terminasi.** Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

2.1.1.4. Pendekatan pengembangan masyarakat

Menurut (Adi, 2008 dalam Haris, 2019) Pendekatan dalam pengembangan masyarakat dibagi menjadi dua yaitu :

1) Pendekatan Direktif

Pendekatan direktif tergantung pada pemahaman bahwa para buruh lokal menyadari apa yang dibutuhkan dan apa yang baik bagi masyarakat. Dalam pendekatan ini pekerjaan tenaga kerja daerah lebih diutamakan karena lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan berasal dari tenaga kerja daerah. Pekerja komunitas

adalah orang yang memutuskan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, langkah apa yang perlu diambil untuk membuatnya lebih baik, dan fasilitas apa yang dibutuhkan untuk membuatnya lebih baik.

2) Pendekatan Nondirektif

Dalam pendekatan nondirective ini, diasumsikan bahwa individu sudah mengetahui apa yang benar-benar mereka butuhkan dan apa yang bermanfaat bagi mereka. Pekerja komunitas tidak berpura-pura menjadi ahli tentang apa yang membuat masyarakat menjadi baik atau buruk dengan strategi ini. Masyarakat itu sendiri merupakan faktor terpenting dalam perubahan masyarakat. Pekerja masyarakat lebih tertarik untuk menemukan dan mewujudkan potensi masyarakat. Jaringan ditawarkan kesempatan untuk memecah dan mengejar pilihan yang menguntungkan mereka dan ditawarkan kesempatan untuk melacak cara mencapai tujuan yang ideal.

2.1.2 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

(Departemen pertanian, 2013) RPL, yakni pengelolaan rumah warga yang dilakukan di pekarangan secara serius memanfaatkannya sebagai aset terdekat untuk menjamin ketersediaan nilai dan pangan keluarga yang fluktuatif. Penerapan prinsip Rumah Pangan Lestari (RPL) disebut sebagai Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) apabila RPL dikembangkan dalam skala besar berbasis desa, dusun, atau kawasan potensial lainnya. Bersamaan dengan pengembangan, pengolahan, dan pemasaran produk, KRPL juga mencakup inisiatif untuk meningkatkan pemanfaatan pagar hidup, jalan desa dan fasilitas umum lainnya (seperti sekolah, gereja, dan lainnya), lahan hijau, dan sumber daya lainnya.

Salah satu program Kementerian Pertanian untuk menjadikan pekarangan lebih ramah lingkungan adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). (Kementerian Pertanian, 2012). Selain pemanfaatan pekarangan, gagasan KRPL juga mencakup gagasan swasembada pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik, dan pembibitan. (Werdhany dan Gunawan, 2012).

2.1.2.1 Penerapan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

(Purwati Saliem 2011) dalam (Kementrian Pertanian 2011) menjelaskan bahwa dalam penerapan model KRPL dibutuhkan 9 tahapan, antara lain :

1. Persiapan

persiapan meliputi: (1) mengumpulkan data awal tentang sumber daya potensial dan kelompok sasaran; 2) bertemu dengan otoritas terkait untuk menyepakati potensi kelompok sasaran dan lokasi; 3) bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Kabupaten/Kota terkait lainnya; dan 4) memilih koordinator yang ahli dalam teknik pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

2. Pembentukan Kelompok

Rumah tangga atau kelompok rumah tangga di Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau dusun/desa merupakan kelompok sasaran. Metode partisipatif meliputi sasaran, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Pengaturan kelompok dilakukan dari, oleh, dan untuk membantu individu kelompok. Dengan prinsip kerukunan, persatuan, dan kepemimpinan diri, kelompok memudahkan anggota untuk bergerak.

3. Sosialisasi

menyampaikan pokok-pokok dan sasaran-sasaran gerakan dan menyepakati maksud-maksud berikut yang akan dilaksanakan. Upaya sosialisasi dilakukan dengan target audiens, tokoh masyarakat, dan petugas dari instansi terkait.

4. Penguatan Kelembagaan Kelompok

Pembentukan dilakukan untuk memperluas kapasitas majelis agar: (1) mampu berunding bersama dan mengambil keputusan; 2) mampu mengikuti keputusan kelompok; (3) siap untuk memperoleh dan memanfaatkan data; (4) siap bekerja dalam perkumpulan (partisipasi bersama); dan (5) mampu bekerja sama dengan kelompok masyarakat lain dan pemerintah daerah.

5. Perencanaan Kegiatan

Menanam aneka tanaman pangan, sayuran, obat-obatan rumah tangga, ikan, dan ternak, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, melestarikan tanaman pangan untuk masa depan, mengelola sampah rumah tangga, dan merencanakan/merancang pemanfaatan pekarangan Juga dibuat rencana kerja satu tahun . Aksi ini dilakukan bersama dengan silaturahmi dan dinas terkait.

6. Pelatihan

Sebelum digunakan di lapangan, diberikan pelatihan. Jenis-jenis pelatihan yang dilakukan antara lain: strategi pengembangan hasil pangan, strategi pengembangan pangan daun-daunan, pengembangan rok, pengembangan ikan dan ternak, pembibitan,

penanganan dan promosi barang serta inovasi pengelolaan sampah rumahan. Penguatan kelembagaan adalah jenis pelatihan lainnya.

7. Pelaksanaan

Kelompok melakukan kegiatan dengan bantuan teknologi yang antara lain diberikan oleh peneliti dan koordinator lapangan. Melalui implementasi bertahap, swasembada pangan rumah tangga, keragaman pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan persemaian desa, dan peningkatan kesejahteraan tercapai..

8. Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari pertemuan, jaringan, dukungan lingkungan/pemerintah pusat, perguruan tinggi, LSM, organisasi rahasia, dan sumber uang tidak terbatas lainnya.

9. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keadaan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana awal dan menilai kesesuaiannya. Grup membentuk peninjau. Selain itu, peninjau mungkin dapat menginspirasi anggota kelompok dan manajer untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

2.1.2.2 Tujuan KRPL

Dalam Pedoman Umum Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) mengungkapkan tujuan KRPL, Antara lain :

- 1) pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan jaringan melalui peningkatan pemanfaatan lahan yang terpelihara;
- 2) Memudahkan rumah tangga dan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan di kota atau desa untuk bercocok tanam, pangan, buah, sayur, dan tanaman obat keluarga (TOGA), peternakan hewan dan ikan, pengolahan produk, dan pengomposan sampah rumah tangga
- 3) Menciptakan sumber benih dan pembibitan untuk memastikan kelangsungan hidup pekarangan dalam jangka panjang dan melindungi tanaman pangan lokal;

Latihan keuangan keluarga asuh yang berguna untuk memiliki pilihan untuk secara bebas mengembangkan bantuan pemerintah keluarga dan menciptakan iklim yang hijau, sempurna dan kokoh. (Badan Litbang Pertanian, 2011).

2.1.2.3 Tahapan KRPL

Dalam (Juknis KRPL 2019) Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dalam konsep KRPL diterapkan dalam 3 tahapan yaitu tahapan penumbuhan, tahap pengembangan dan tahapan kemandirian:

1) Tahap Penumbuhan

Pada tahapan ini dibutuhkan minimal 15 rumah tangga dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan pendampingan dan pelatihan dilakukan oleh penyuluh
- b) Pembuatan demplot (demonstrasi plot) kelompok yang digunakan sebagai laboratorium lapangan dalam kegiatan KRPL
- c) Pembuatan kebun bibit sebagai stok bibit tanaman dan cadangan pangan
- d) Pendampingan dan penyuluhan lapangan

2) Tahap Pengembangan

Pada tahap pengembangan dilakukan beberapa tahapan antara lain:

- a) Pengembangan demplot
- b) Pengembangan kebun bibit
- c) Pengembangan pekarangan anggota
- d) Demonstrasi penyediaan menu B2SA

3) Tahap Kemandirian

Pada tahap ini dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka menilai perkembangan dari program KRPL.

2.1.3 Pendapatan Keluarga

(Reksoprayitno, 2009) pendapatan adalah berapa banyak gaji yang diterima warga negara selama periode tertentu sebagai pertukaran untuk variabel kreasi yang mereka tambahkan ke pengembangan barang publik. Pendapatan seseorang adalah uang yang mereka peroleh dari bisnis dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Ini juga termasuk manfaat seperti asuransi kesehatan dan pensiun.

Menurut (Sunuharjo, 2009) Ada 3 kategori pendapatan yaitu :

1) pendapatan berupa uang, khususnya penghasilan tunai reguler dan berulang yang biasanya diterima sebagai kompensasi.

2) pendapatan sebagai barang dagangan, tepatnya gaji standar dan umum, namun konsisten sebagai upah yang didapat sebagai tenaga kerja dan produk.

3) Setiap pendapatan redistributif yang berpotensi mengubah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan non-pendapatan. Keluarga adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan.

Di mana keluarga adalah tempat pertama dan terpenting di mana kehidupan dimulai dan bekerja sama di antara individu-individunya. Keluarga adalah lembaga sosial terkecil dengan struktur dan sistem sosialnya sendiri. Sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah dan masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah melalui perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain-lain. (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2013 hlm, viii dalam Aziz, 2017).

Dari perspektif ini, pendapatan keluarga adalah pendapatan yang diperoleh anggota keluarga dari berbagai sumber. Upah atau gaji anggota keluarga yang bekerja, pendapatan dari usaha anggota keluarga, dan sumber pendapatan lain semuanya termasuk dalam pendapatan rumah tangga.

Menurut (Gilarso, 2008) Pendapatan keluarga merupakan upah dari pekerjaan atau imbalan dari hadiah yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Secara nyata pendapatan keluarga berasal dari :

- 1) Bisnis: misalnya bisnis, hortikultura, menyala sebagai visioner bisnis
- 2) Bekerja untuk orang lain: sebagai pegawai atau pegawai negeri, misalnya.
- 3) Hasil pemilihan: misalnya sewa tanah dan lain-lain. Uang atau barang, seperti ganti rugi berupa beras atau perumahan, merupakan contoh bentuk penghasilan. Pendapatan seseorang biasanya terdiri dari pendapatan berupa barang dan uang.

(Nugraheni, 2007). menjelaskan bahwa pendapatan adalah total pendapatan formal, informal, dan subsistem ketika pendapatan keluarga lebih ditekankan. Setiap pendapatan dalam bentuk uang atau barang yang biasanya diterima sebagai kompensasi dianggap sebagai pendapatan formal. penghasilan dari pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama seseorang yang dianggap informal. Sedangkan pembayaran subsistem adalah pembayaran dari wilayah produksi yang dinilai dalam

bentuk uang dan muncul ketika produksi dan pemanfaatan berada di tangan yang sama atau dalam kelompok lokal kecil.

2.1.4 Kelompok PKK

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 7 Menjelaskan “Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga atau rukun tetangga atau sebutan lain yang menggordinasikan kelompok dasawisma”.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah wadah yang menampung dan melaksanakan usaha dan prakarsa masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebuah forum yang menggali dan menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dimulai dari desa-desa di seluruh tanah air dan berfokus terutama pada perempuan, telah berhasil. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010 hlm, 23).

2.1.4.1 Tujuan PKK

Menurut (Mirnawati, 2018) Dalam Kelompok PKK Tujuan PKK Dibagi menjadi dua antara lain:

1. Tujuan Umum PKK

Melalui pelaksanaan sepuluh program unggulan PKK, mendorong tumbuhnya kemandirian gerakan PKK di lingkungan keluarga dan masyarakat dari waktu ke waktu.

2. Tujuan Khusus PKK

Kesepuluh program unggulan PKK tersebut akan dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab di semua tingkatan dalam waktu yang relatif singkat. Kualitas organisasi gerakan PKK juga akan meningkat, demikian juga dengan kapasitasnya untuk merekrut kader-kader yang handal dan berkualitas baik di perkotaan maupun di pedesaan. selain memperluas kemitraan di bawah UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.4.2 Program Kelompok Kerja (pokja) PKK, Program Pokok PKK

1. Program Kelompok Kerja (Pokja)

Berikut adalah program Kelompok Kerja (Pokja) yang dilaksanakan kelompok PKK antara lain :

- a. Pokja I mengelola program Penghayatan dan pengamalan Pancasila serta mengelola program gotong royong
- b. Pokja II mengelola program Pendidikan dan keterampilan serta Pengembangan kehidupan kooperatif
- c. Pokja III mengelolah program Ssndang dan pangan serta mengelola perumahan dan tata laksana rumah tangga
- d. Pokja IV mengelolah program Kesehatan, Kelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan sehat

2. Program Pokok

Sesuai revisi pedoman Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan 10 program pokok PKK, program PKK telah melakukan pembenahan kesekretariatan dan pengarahan langsung ke setiap kecamatan dan dusun dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. Adapun program PKK yang harus diperhatikan yaitu:

a. Pemahaman dan Penerapan Pancasila

Untuk melaksanakan pemajuan kesadaran keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dilakukan sosialisasi dengan mereka melalui penyuluhan, pelatihan, dan simulasi untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

b. Gotong Royong

Dalam pelaksanaan gotong royong, penting untuk membangun kerjasama yang baik antara keluarga, penghuni dan perkumpulan untuk menciptakan rasa solidaritas dan persatuan.

c. Pangan

Berkonsentrasi pada penyelenggaraan kebutuhan pangan keluarga merupakan hal penting yang diperhitungkan dalam perkembangan dan kesejahteraan kerabat dalam bantuan pemerintah keluarga. Makanan untuk keluarga harus seimbang, memenuhi kebutuhan kalori setiap orang, mengandung protein, vitamin, dan mineral, serta menarik dan lezat agar sesuai dengan selera dan anggaran keluarga.

d. Sandang

Sebagai kebutuhan hidup keluarga, mengatur kebutuhan pakaian berdampak pada kesejahteraan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarga. serta membina dress code yang sesuai dengan budaya Indonesia dan mendorong masyarakat untuk lebih menghargai barang-barang dalam negeri.

e. Pengelolaan rumah tangga dan perumahan

Selain sandang dan pangan, tempat tinggal merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Karena perumahan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, maka diperlukan investasi terhadap kemampuan rumah untuk berfungsi sebagai tempat tinggal yang nyaman dan bermanfaat.

membawa kesadaran masyarakat akan perumahan yang layak huni, sehat, bahaya tinggal di daerah perbukitan, dan legalitas rumah dan properti kepada khalayak yang lebih luas.

f. Instruksi dan kemampuan

Mengembangkan informasi dan kesadaran keluarga tentang perkembangan dan peningkatan anak yang ideal dan pentingnya pendidikan PAUD dengan BKB atau Pengembangan Keluarga Bayi dan arahan PAUD. Memberikan konseling kepada keluarga dan mendidik mereka tentang persyaratan pendidikan dasar 12 tahun.

g. Pendidikan kesehatan pribadi dan keluarga,

Kebersihan lingkungan, sumber air minum yang aman, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan adalah semua bidang yang menjadi perhatian bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat dan keluarganya. Selain itu, kepedulian keluarga terhadap pola hidup bersih dan sehat serta pola makan yang seimbang, serta upaya peningkatan gizi keluarga.

h. Tumbuhnya kehidupan koperasi

Meningkatkan pendapatan keluarga dengan mendorong keluarga untuk bergabung dalam koperasi. Keuangan keluarga memadai, efektif, dan fungsional berdasarkan pendapatan, yang ditunjukkan oleh pengeluaran dan pendapatan keluarga. Hal ini dicapai dengan menjalani gaya hidup sederhana dan sehat.

i. Kelestarian lingkungan

Praktek membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan dengan sabun setelah buang air kecil atau buang air besar, dan mencuci tangan sebelum makan, minum, atau

mengolah makanan. sebagai paru-paru lingkungan, merawat sampah rumah tangga dan kebersihan diri serta melaksanakan program Sejuta Pohon

j. Perencanaan yang sehat

Merencanakan kehidupan dan pendapatan keluarga di masa depan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan, keadaan, dan kemampuan masing-masing keluarga agar dapat mencapai kesejahteraan bagi keluarganya dan kesejahteraan masyarakat. Lebih banyak pelatihan tentang pentingnya pemahaman dan keikutsertaan dalam program penataan keluarga untuk keluarga berkualitas.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, perlu adanya hasil penelitian yang relevan, hasil penelitian yang relevan yang didapat peneliti antarlain:

1. **(Ainun & Idrus, 2021)** dengan judul **“RUMAH PANGAN LESTARI ORGANIK SEBAGAI SOLUSI PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA”** dengan hasil Penelitiannya:

- a) Reaksi yang umumnya sangat baik yang diberikan oleh daerah setempat harus terlihat dari kerjasama daerah setempat dalam program IBM dengan tujuan agar program dapat berjalan dengan baik
- b) Hasil dari tindakan tercermin dalam perubahan mentalitas individu, dimana tanah di sekitar rumah yang tadinya tidak terpakai kini terlihat hijau dan asri.
- c) Peningkatan pendapatan keluarga sebesar Rp200-Rp400 Ribu di setiap rumah tangga mitra yang berpartisipasi.

2. **(Oka, I., Darmawan, Dwi., Astiti, 2016)** dengan judul **“KEBERHASILAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) PADA KELOMPOK WANITA TANI DI KABUPATEN GIANYAR”** dengan hasil penelitiannya yaitu :

- a) Keberhasilan program KRPL di Kabupaten Gianyar dipengaruhi secara positif oleh karakteristik petani perempuan. Karakteristik perempuan tani yang paling berpengaruh adalah pendidikan informal berupa kursus atau sekolah lapangan yang berkaitan dengan program KRPL.
- b) Pelaksanaan dan keberhasilan program KRPL di Kabupaten Gianyar dinilai sangat baik oleh KWT. Inovasi teknologi program KRPL memiliki dampak terbesar.

c) Di Kabupaten Gianyar, program KWT KRPL dinilai sangat berhasil. Di KWT Kabupaten Gianyar, pelaksanaan program KRPL telah meningkatkan konsumsi pangan keluarga dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan nilai PPH sebesar 71,5 di wilayah studi dan pendapatan rata-rata Rp 48.448/bulan dari pemanfaatan pekarangan.

3. **(Tamara et al., 2020)** dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DI DESA CIGANJENG KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN”** dengan hasil penelitiannya yaitu :

Dengan skor Likert 3,9, pelaksanaan di Kelompok Tani Muda Mekar Bayu Desa Ciganjeng berjalan lancar. Seputar penegasan Edward III mengenai faktor pendukung dan penghambat. harus diselesaikan dengan baik dengan menelaah komunikasi mitra dan pelaksana program untuk mencapai 100% kebijakan program yang berarti menyebarkan sosialisasi. Program KRPL dilaksanakan secara efektif oleh pelaksana dan pendamping; Namun, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa implementasinya tidak optimal karena sayuran keluarga dari penggunaan lahan tidak dikonsumsi dalam jumlah yang cukup.

4. **(Dwiratna et al., 2016)** dengan judul **“PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN DENGAN MENERAPKAN KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI”** dengan hasil penelitiannya :

Dengan memanfaatkan gagasan produksi pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, kegiatan nirlaba ini dapat meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya memanfaatkan pekarangan. Pada intinya masyarakat khususnya ibu-ibu desa Rawa dan Lumbungsari memanfaatkan kebun sedemikian rupa sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada peningkatan kemampuan ibu-ibu dalam menyiapkan tanah pot sayuran dan memanfaatkan tanaman lokal. Bahan pembuatan wadah dan pot, serta pupuk cair organik.

5. **(Muniarty et al., 2021)** dengan judul **“PEMBERDAYAAN WANITA TANI GUNA PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI BERBASIS KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI DI KOTA BIMA”** dengan hasil penelitiannya :

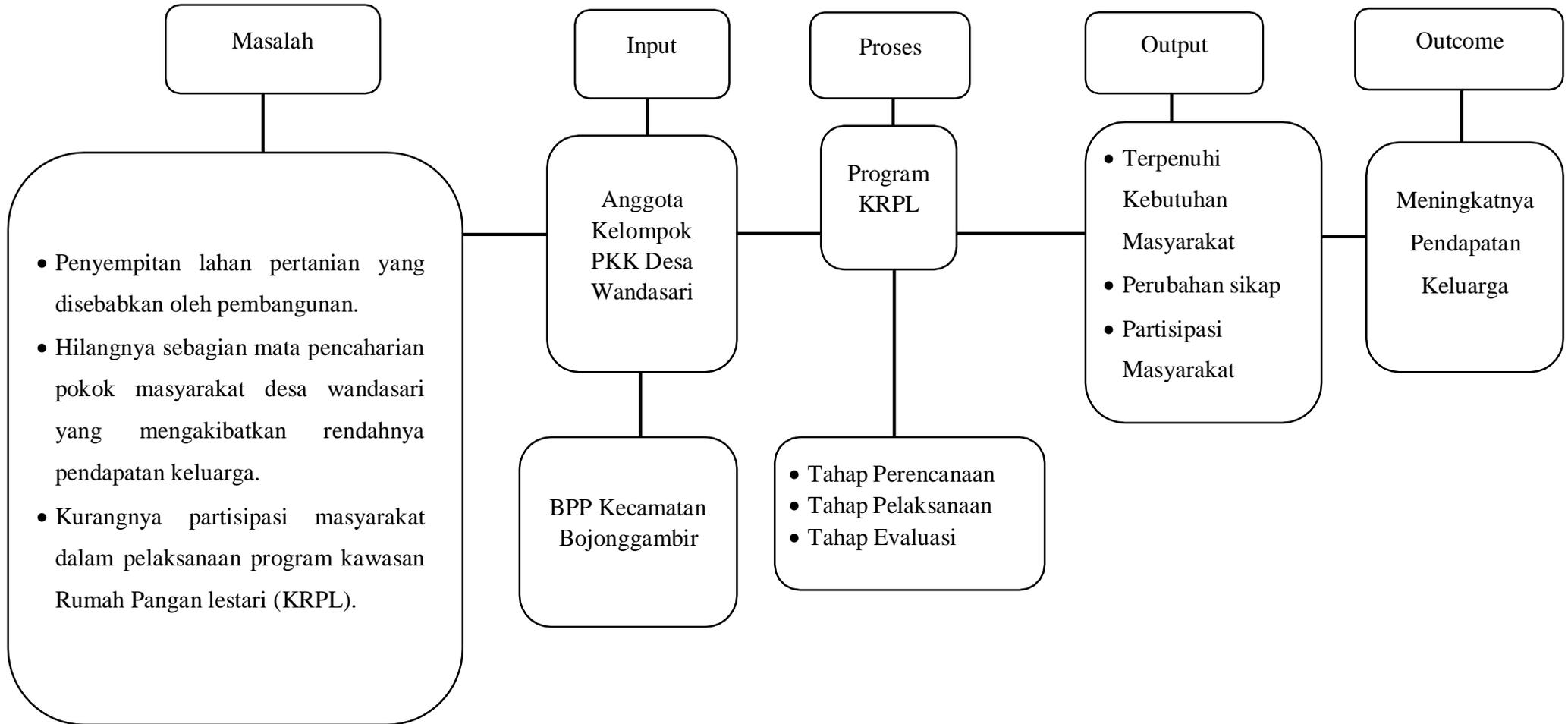
Salah satu cara agar petani perempuan di kota Bima lebih berdaya adalah dengan membantu mereka memanfaatkan lahan. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional dan pengetahuan masyarakat secara keseluruhan dan KWT Mekar Sari pada khususnya. Membina sosialisasi untuk mendorong setiap anggota kelompok memanfaatkan pekarangan sehingga analisis total biaya, total pendapatan, dan total pendapatan menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga.

2.3 Kerangka Konseptual

Dampak program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terhadap pengembangan masyarakat di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya menjadi bahan kajian ini. Pemberdayaan masyarakat di Kelompok PKK Desa Wandasari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dijabarkan dalam Kerangka Konseptual ini.

Siklus yang dilakukan dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Wajar adalah tahapan mendukung, mengikuti, menggunakan dan memberikan materi. Materi yang diberikan disini adalah memberikan materi kepada anggota tentang program rumah pangan lestari dengan tujuan agar anggota dapat memahami apa itu program rumah pangan lestari itu sendiri. Pemanfaatan berkaitan dengan bagaimana pekarangan rumah dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk program Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pemeliharaan berkaitan dengan bagaimana peserta dapat merawat pekarangan agar hasil program dapat tercapai. Namun demikian, tujuan dari dukungan ini adalah untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada seluruh peserta program agar dapat menjalankan agenda program secara efektif.

Perkembangan masyarakat sebagai hasil pemanfaatan pekarangan rumah yang dilakukan dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini merupakan output yang dihasilkan dari adanya program kawasan rumah pangan lestari ini. Sementara tujuan jangka panjang Program Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, partisipasi kelompok PKK dalam program telah menghasilkan hal ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka yang sudah dijelaskan tersebut, dapat dilihat pertanyaan penelitian yang harus dicari jawabannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga ?
- b. Hasil Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga ?